

INTISARI

Menggunakan metode penelitian kepustakaan, Penelitian ini bermaksud untuk memahami praktik hegemoni pembangunanisme berbasis pemberdayaan Pasca Orde Baru. Penelitian ini mengambil studi program peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan yang digunakan oleh kementerian sosial untuk memberdayakan masyarakat suku “Togutil” di Halmahera Timur, Maluku Utara. Untuk memahami hal tersebut, Studi ini menggunakan perspektif stukturalis dengan meminjam gagasan Hegemoni dari Antonio Gramsci dan Aparatus ideologis dari Louis Althusser yang dielaborasi dengan gagasan James Ferguson tentang ‘mesin anti-politik’ untuk menjelaskan cara kerja praktik hegemoni.

Studi ini berpendapat bahwa paradigma baru “pembangunanisme berbasis pemberdayaan hanyalah “aparatus konseptual” baru yang di desain oleh untuk mengukuhkan kembali hegemoni pembangunanisme pasca krisis ekonomi dan legitimasi tahun 1998. Klaim-klaim pemberdayaan itu hanya sebatas ‘jargon” yang digunakan untuk memikat hasrat dan simpati masyarakat sekaligus memberikan agenda pembangunan dengan sumber legitimasi baru. Gagasan pemberdayaan itu diadopsi oleh Departemen sosial pasca orde baru sebagai mesin anti-politik yang dirancang untuk mendepolitisasi masyarakat.

Studi menunjukan bahwa, dalam praktiknya program-program pemberdayaan yang dijalankan untuk memberdayakan suku Togutil tidak merubah nasib masyarakat, program ini justru melahirkan kekerasan defenitif terhadap masyarakat. dalam kaca mata developmentasli bisa dibilang program ini sengaja dirancang untuk gagal atau melahirkan persoalan baru bagi masyarakat, Sehingga kegagalan itu menjadi alasan bahwa program-program untuk memberdayakan masyarakat suku togutil terus digalakan.

Kata kunci: Hegemoni, Aparatus Konseptual, Depolitisasi, Pembangunanisme, Pemberdayaan, Mesin Anti-Politik, Suku Togutil.

ABSTRACT

Using library research methods, this research is intended to understand the post-New Order empowerment-based developmental hegemonic practices. This research takes the study program of improving welfare and poverty alleviation used by social solutions to empower the "Togutil" tribal community in East Halmahera, North Maluku. To understand this, this study uses a structuralist perspective by borrowing the idea of Hegemony from Antonio Gramsci and ideological apparatus from Louis Althusser which is elaborated with James Ferguson's idea of 'anti-political machine' to explain how hegemony practices work.

This study argues that the new paradigm of “empowerment-based developmentism is just a new “contextual apparatus” designed to reaffirm the hegemony of developmentism after the economic crisis and legitimacy in 1998. Claims to strengthen it are only limited to “jargon” used to attract stories and sympathy. society as well as providing a development agenda with a new source of legitimacy. The notion of empowerment was adopted by the Ministry of Social Affairs after the New Order as an anti-political machine designed to depoliticize society.

The study shows that, in practice, the empowerment programs implemented to deceive the Togutil tribe have not changed the fate of the community, this program has actually created definitive violence against the community. From an original development point of view, you could say that this program was deliberately designed to fail or create new problems for the community, so that failure is the reason that programs for the utilization of the Togutil people continue to be encouraged.

Keywords: Hegemony, Conceptual Apparatus, Depoliticization, Developmentism, Empowerment, Anti-political Machine, Togutil Tribe.